

**THE ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT INEQUALITY AND INEQUALITY OF INCOME DISTRIBUTION IN SOUTH KALIMANTAN PROVINCE (CASE STUDY OF BANJARMASIN CITY AND TANAH BUMBU REGENCY)**

**Martin Vegarika Suntari\*, Ahmad Yunani**

Faculty Of Economics and Business, Lambung Mangkurat University, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.29, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

[\\*martinvegarika@gmail.com](mailto:martinvegarika@gmail.com)

**Abstract** - This study aims to find out how the level of economic development inequality and the inequality of income distribution in Banjarmasin City and Tanah Bumbu Regency, and how the comparison of the economic development inequality and the inequality of income distribution in that two regions. This study uses secondary data from the period of 2013-2017. The data is obtained from BPS. The analysis of inequality level of economic development using Williamson index, and analyzing the inequality of income distribution using the index gini ratio. The comparison results of Williamson index and the gini ratio index during 2013-2017 found that each analysis tool had different results. So that, it can be explained that the inequality level of regional economic development in the Tanah Bumbu Regency area with an average of 0.171 occurred due to the economy which relies on natural resources (mining and excavation), the mobility of goods and services is not smooth (distribution of goods and migration). However, the level of inequality in income distribution is low with an average of 0.312. It is because the depreciation of people's work is not much different, so that the income distribution is more evenly distributed. The inequality of economic development in Banjarmasin city is low with an average of 0.021. It occurs because the Banjarmasin city is the center of economy activities in the Province of South Kalimantan (the provincial capital). Banjarmasin city has the better infrastructure availability than other regions. In contrary, the inequality level of income distribution is in high level with an average of 0.354. It occurs because of the differences in types of work and skills of people in Banjarmasin. In addition, it also occurs because Banjarmasin City has a small area so that there is an inequality in income distribution.

**Keywords:** Williamson Index, and Gini Ratio Index.

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN DAN KABUPATEN TANAH BUMBU)**

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu serta bagaimana komparatif dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan pada dua wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu tahun 2013-2017 yang diperoleh dari BPS. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dengan menggunakan indeks Williamson, sedangkan untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan indeks gini rasio. Hasil analisis komparatif indeks Williamson dan indeks gini rasio selama tahun 2013-2017 didapatkan bahwa masing-masing alat analisis memiliki hasil yang berbeda sehingga dapat dijabarkan saat tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah tinggi untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan rata-rata 0,171 terjadi karena peran sektor ekonomi yang bertumpu pada SDA (pertambangan dan penggalian), kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa (penyebaran barang dan migrasi). Akan tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya rendah dengan rata-rata sebesar 0,312 karena deprensiasi pekerjaan masyarakatnta yang tidak jauh berbeda sehingga distribusi pendapatannya lebih merata. Saat ketimpangan pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin rendah dengan rata-rata 0,021 terjadi karena Kota Banjarmasin merupakan pusat/konsentrasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan (ibukota provinsi) selain juga memiliki kesediaan infrastruktur yang lebih lengkap dari wilayah lain, akan tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya tinggi dengan rata-rata 0,354 terjadi karena perbedaan jenis pekerjaan dan *skill* yang dimiliki masyarakat Kota Banjarmasin serta memiliki luas wilayah yang kecil sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan.

**Kata Kunci :** Indeks Williamson, dan Indeks Gini Rasio

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang diikuti oleh perubahan dalam aspek lain dalam pembangunan perekonomian seperti pendidikan, tingkat keahlian tenaga kerja (*softskill*), tingkat perbaikan teknologi yang inovatif, dan tingkat kemakmuran masyarakatnya (Sukirno, 2015). Sehingga dalam suatu pembangunan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang dalam mencapainya, dan perlu diiringi dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat secara berkesinambungan serta peningkatan aspek pembangunan ekonomi lainnya.

Pertumbuhan ekonomi bisa digunakan sebagai indikator untuk mendefinisikan tingkat kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan pemerataan pembangunan bisa menjadi sebuah bukti sejahteranya suatu wilayah, namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersamaan dengan hasil pembangunan yang tidak merata.

Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan tiga besar kabupaten/kota penyumbang PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan (BPS Kalsel), yang mana Kota Banjarmasin pada urutan pertama, kedua Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu pada urutan yang ketiga. Penulis mengambil objek penelitian pada Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu karena Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan yang memberi sumbangan terbesar pada PDRB Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi akibat perbedaan sumber daya alam pada masing-masing daerah (Sjafrizal, 2014), hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada terciptanya pembangunan ekonomi. Perbedaan ini juga akan mempengaruhi kemampuan beberapa wilayah untuk tumbuh cepat atau tumbuh lambat dalam pembangunan ekonomi.

Masalah pembangunan ekonomi selalu menjadi pembicaraan hangat, terutama terkait ketimpangan. Dalam pembangunan mengharuskan adanya tingkat PDRB yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2011), namun masalahnya bukan hanya bagaimana tetapi juga siapa yang berperan. Sampai saat ini masalah ketimpangan antar wilayah menjadi perhatian ekonom, padahal seharusnya ada keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya sehingga terjadi proses interaksi antar wilayah untuk saling mendukung dan berkembang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu? (2) Bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu? (3) Bagaimana komparatif dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan komparatif dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan

distribusi pendapatan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan aspek lain dalam pembangunan perekonomian seperti pendidikan, tingkat keahlian tenaga kerja (*softskill*), tingkat perbaikan teknologi yang inovatif, dan tingkat kemakmuran masyarakatnya (Sukirno, 2015).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yaitu kondisi terjadinya perkembangan fiskal produksi barang dan jasa terhadap peningkatan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat.

### **Pembangunan Ekonomi Regional**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Arsyad, Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, 1999)

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk domestik regional bruto adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam kurun waktu tertentu yang pada umumnya dalam satu tahun (Sukirno, 2015). Menurut Bank Indonesia PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah

dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

### **Ketimpangan Pembangunan**

Williamson (1965) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang. Didapat hasil jika selama tahap pembangunan akan terjadi disparitas regional yang besar dan pembangunan hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap lebih matang dari pertumbuhan ekonomi akan tampak keseimbangan antar daerah dan berkurangnya disparitas secara signifikan (Arsyad, 2010)

### **Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Teori ketimpangan distribusi pendapatan muncul dari sebuah hipotesa yaitu Hipotesis U terbalik (*inverted U curve*) oleh Simon Kuznets. Kuznets (1955) berpendapat bahwa saat pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan menjadi tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan menjadi merata. Distribusi pendapatan menggambarkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan bagi penduduk (Todaro & Smith, 2011).

### **Ukuran Ketimpangan**

Secara umum untuk mengetahui besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan digunakan alat ukur seperti Gini Rasio dan Kurva Lorenz. Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah digunakan alat ukur seperti Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

### **Penyebab Ketimpangan**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan (Sjafrizal,

2014), yaitu (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Daerah dengan kepemilikan sumber daya alam yang banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relative lebih murah dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit, karena akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang relative lebih mahal sehingga daya saingnya lemah. Kondisi ini juga menyebabkan daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat (2) Perbedaan kondisi demografis, kondisi demografis yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi selanjutnya yang akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, Mobilitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penyebabnya adalah jika mobilitas kurang lancar maka kelebihan

produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan, begitu pula dengan migrasi yang kurang lancar dapat menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan sehingga daerah terbelakang akan sulit mendorong kegiatan ekonominya (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, Konsentrasi kegoatan ekonomi yang tinggi pada suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah, dan membuat pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat. Dan kemudian akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena terdapatnya sumber daya alam yang melimpah pada daerah tertentu misalnya minyak bumi, gas, batubara, dan bahan mineral lainnya. Kedua lebih meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara. Ketiga yaitu kondisi demografis (kependudukan) dimana sumber daya manusia yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan dengan kualitas yang baik(5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah, Suatu daerah jika mendapatkan alokasi investasi yang besar dari pemerintahan atau dapat menarik banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini tentunya akan dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan studi kasus Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan suatu hasil penelitian dengan dukungan kepustakaan yang memperkuat analisa peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang kemudian dipaparkan secara tertulis. Data yang digunakan berupa data sekunder runtun waktu (*time series*) dengan tahun analisa 2013-2017 yang diperoleh dari berbagai laporan data serta bentuk publikasi juga didapatkan dari literatur dan jurnal yang sesuai..

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : (1) Dokumentasi ialah teknik mencari data yang berupa catatan, buku, surat kabar, makalah dan sebagainya. Pengumpulan data terhadap berbagai data sekunder yang dibutuhkan berasal dari data-data statistik yang tertulis maupun yang dipublikasikan (2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara mendalam dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Wawancara dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait.

**Teknik Analisis Data**

**Alat Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi**

Untuk menghitung tingkat pembangunan ekonomi penulis menggunakan Indeks Williamson, berikut rumusnya :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}}, \text{ dimana } 0 < V_w < 1$$

Keterangan :

$y_i$  : pendapatan pe kapita kabupaten/kota  $i$

$y$  : pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Selatan

$f_i$  : jumlah penduduk di kabupaten/kota  $i$

$n$  : jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil hitung dari indeks Williamson jika angka mendekati nol menunjukkan bahwa ketimpangan disuatu daerah rendah dan bila angka mendekati angka satu maka diketahui bahwa ketimpangan daerah tertentu mengalami ketimpangan yang tinggi.

**Alat Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi peneliti menggunakan indeks gini rasio, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang bersangkutan. Hasil dari indeks Gini Rasio jika angka mendekati nol menunjukkan bahwa ketimpangan disuatu daerah rendah dan bila angka mendekati angka satu maka diketahui bahwa ketimpangan daerah tertentu mengalami ketimpangan yang tinggi. Ukuran numerik ketimpangan distribusi pendapatan berkisar dari angka nol (kemerataan sempurna) sampai dengan satu (ketimpangan sempurna), yang berarti jika angka gini rasio mendekati angka nol maka tingkat pemerataan pendapatan semakin besar dan sebaliknya jika angka gini rasio mendekati satu maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar (Todaro & Smith, 2011).

**HASIL DAN ANALISIS**

**Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi**

Berdasarkan jumlah penduduk serta PDRB per kapita Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2013-2017

dapat digunakan untuk menghitung indeks Williamson. Hasil perhitungan indeks Williamson cenderung menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Indeks Williamson Tahun 2013-2017**

Tahun	Banjarmasin	Tanah Bumbu
2013	0,41	0,197
2014	0,35	0,183
2015	0,27	0,171
2016	0,19	0,158
2017	0,013	0,146
<b>Rata-rata</b>	<b>0,027</b>	<b>0,171</b>

Sumber : data diolah, 2019

Dari rata-rata indeks Williamson Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2013-2017, angka dengan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang rendah yaitu Kota Banjarmasin sebesar 0,027 dan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki rata-rata yang besara yaitu 0,171 sehingga mengalami ketimpangan pembangunan ekonomi lebih tinggi dibanding Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sektor ekonomi yang memberi kontribusi besar terhadap PDRB wilayahnya masing-masing, untuk Kabupaten Tanah Bumbu sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun memiliki angka ketimpangan pembangunan ekonomi yang lebih besar daripada Kota Banjarmasin, tetapi dapat dilihat dari angka indeks Williamson setiap tahunnya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi karena kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang terus mengalami penurunan. Dari hasil penelitian Firda (Rahmadiyahanti, 2015) mengatakan bahwa semakin kecil peran sektor pertambangan dan

penggalian akan mempengaruhi menurunnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah hal ini terjadi karenan pemerintah akan menggali dan meningkatkan potensi-potensi dari sektor-sektor ekonomi lainnya guna mempertahankan perekonomian wilayahnya.

**Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Saat pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan menjadi tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan menjadi merata. Distribusi pendapatan menggambarkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan bagi penduduk suatu wilayah. Koefisien gini rasio bagi wilayah-wilayah yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada dalam angka 0,50-0,70, sedangkan bagi wilayah yang distribusi pendapatannya relatif merata memiliki angkat antara 0,20-0,35 (Todaro & Smith, 2011).

**Tabel 2**  
**Indeks Gini Rasio Tahun 2013-2017**

Tahun	Banjarmasin	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
2013	0,37	0,33	0,357
2014	0,33	0,29	0,342
2015	0,39	0,33	0,343
2016	0,35	0,31	0,341
2017	0,33	0,30	0,347
<b>Rata-rata</b>	<b>0,354</b>	<b>0,312</b>	<b>0,346</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019

Dapat dilihat pada Tabel 2, angka rata-rata indeks gini rasio Kota Banjarmasin sebesar 0,354 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan rata-rata yaitu sebesar 0,312. Indeks gini rasio Kota Banjarmasin lebih besar pula dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan rata-rata sebesar 0,346, sehingga dapat diketahui bahwa Kota Banjarmasin memiliki tingkat ketimpangan distribusi

pendapatan lebih besar dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu.

**Analisis Komparatif Indeks Williamson dan Indeks Gini Rasio**

Dalam pembahasan ini, penulis membandingkan hasil perhitungan indeks Williamson dan indeks gini rasio Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi wilayahnya.

**Tabel 3**  
**Indeks Williamson dan Indeks Gini Rasio Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013-2017**

Tahun	Indeks Williamson		Indeks Gini Rasio	
	Banjarmasin	Tanah Bumbu	Banjarmasin	Tanah Bumbu
2013	0,041	0,197	0.37	0.33
2014	0,035	0,183	0.33	0.29
2015	0,027	0,171	0.39	0.33
2016	0,019	0,158	0.35	0.31
2017	0,013	0,146	0.33	0.30
<b>Rata-rata</b>	<b>0,027</b>	<b>0,171</b>	<b>0.354</b>	<b>0.312</b>

Sumber : data diolah dari Tabel 1 dan Tabel 2, 2019

Berdasarkan Tabel 3, hasil dari perhitungan indeks Williamson rata-rata angka indeks Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0,171 lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin dengan rata-rata 0,027. Ketimpangan pembangunan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,041 untuk Kota Banjarmasin dalam lima tahun analisa, dan untuk Kabupaten Tanah Bumbu ketimpangan pembangunan ekonomi tertinggi sebesar 0,197 pada tahun 2013 pula.

**Tabel 4**  
**Kontribusi 5 Sektor Terbesar Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (dalam persen)**

SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,62	16,20	17,02	16,96	16,77
Pertambangan dan Penggalian	48,27	45,99	41,12	37,94	36,97
Industri Pengolahan	6,44	6,75	7,47	8,29	8,49
Konstruksi	5,40	5,50	6,03	6,33	6,42
Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,46	5,82	6,50	7,17	7,55

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah), 2019

Salah satu penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah (Sjafrizal, 2014) yaitu adanya perbedaan kandungan sumber daya alam yang menyebabkan perekonomian suatu wilayah bertumpu pada sektor primer, dapat dilihat pada Tabel 4 sektor ekonomi yang berkontribusi tinggi pada PDRB Kabupaten Tanah Bumbu berupa sektor primer yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi selama 2013-2017 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian suatu wilayah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi diukur oleh variable dan indicator lainnya, hal ini didasari karenan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah belum mencerminkan penerimaan pendapatan

perkapita yang tinggi oleh masyarakat dan tidak menggambarkan pula distribusi pendapatan maupun pembangunan ekonomi wilayah yang adil dan merata bagi masyarakat (Bappeda, 2017)

**Tabel 5**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013-2017 (dalam persen)**

No	Tahun	Kota Banjarmasin	Kabupaten Tanah Bumbu
1	2013	6,93	3,80
2	2014	6,11	3,74
3	2015	5,79	2,94
4	2016	6,28	3,12
5	2017	6,40	4,14
<b>Rata – rata</b>		<b>6,30</b>	<b>3,55</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019

Dilihat kembali Tabel 3 rata-rata indeks gini rasio Kota Banjarmasin memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0,354 lebih tinggi dibandingkan kabupaten Tanah Bumbu yang hanya sebesar 0,312. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,39 untuk Kota Banjarmasin dan sebesar 0,33 untuk Kabupaten Tanah Bumbu yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015.

**Tabel 6**  
**Kontribusi 5 Sektor Terbesar Terhadap PDRB Kota Banjarmasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017(dalam persen)**

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
<b>2016</b>	28.416	3.723	1.642	33.781
<b>2017</b>	31.416	3.723	1.642	36.781

Sumber : BPS Kota Banjarmasin (data diolah), 2019

Pada tahun 2013-2017 Kota Banjarmasin memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu, hal ini dikarenakan sektor ekonomi yang berkontribusi paling besar pada PDRB Kota Banjarmasin

yaitu sektor ekonomi sekunder. Sektor ekonomi sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil dari sektor primer menjadi barang jadi (Wikipedia, 2018), dilihat dari Tabel 6 sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kota Banjarmasin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi secara keseluruhan. Dari Tabel 5 dapat dilihat laju pertumbuhan Kota Banjarmasin tahun 2015 adalah yang paling rendah yaitu sebesar 5,79%, sama dengan hasil indeks gini rasio Kota Banjarmasin yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi yaitu pada tahun 2015 juga sebesar 0,39%.

**Tabel 7**  
**Daftar UMKM Kota Banjarmasin Tahun 2016-2017**

SEKTOR	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	19,72	18,91	18,45	18,27	18,42
Konstruksi	9,42	9,57	9,80	9,72	9,88
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,09	12,18	12,36	12,53	12,60
Transportasi dan Perdagangan	9,91	10,16	10,31	10,34	10,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,32	13,23	13	13,07	13,02

Sumber : Dinas Koperasi & UKM Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Banjarmasin lebih besar dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu, hal ini dikarenakan sektor ekonomi sekunder yang

sangat berperan terhadap PDRBnya. Sektor industri pengolahan merupakan yang paling besar kontribusinya, dapat dilihat dari Tabel 7 selama dua tahun terakhir jumlah UMKM yang beroperasi di Kota Banjarmasin terus bertambah. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 33.781 usaha dan meningkat sebanyak 3.000 usaha pada tahun 2017 menjadi 36.781 usaha, adanya UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang membuktikan tingkat produktivitas masyarakatnya dalam berwirausaha. Salah satu peran penting UMKM adalah daya serapnya terhadap tenaga kerja di kota Banjarmasin.

## **PENUTUP**

### **Implikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi adalah Kabupaten Tanah Bumbu dengan rata-rata sebesar 0,171% dan wilayah yang mengalami tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi adalah Kota Banjarmasin dengan rata-rata sebesar 0,354%. Hanya saja tingkat ketimpangan yang terjadi selama 2013-2017 telah mengalami penurunan, sehingga sektor-sektor ekonomi yang masih digali potensinya bisa segera ditingkatkan pemanfaatannya.

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah yang terkait untuk menjadi bahan referensi untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerahnya. Selain itu pula perlu adanya kerjasama antar pemerintah dengan semua rakyat dalam mengurangi tingkat ketimpangan misalnya dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dengan menyediakan infrastruktur ke seluruh daerah

secara merata seperti penyebaran pembangunan jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian di areal strategis di masing-masing daerah.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini penulis hanya mengaitkan ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB per kapita saja, padahal banyak indikator lain yang bisa digunakan seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi dan masalah ekonomi lainnya yang berkaitan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan berupa, *pertama* hasil hitung dari indeks Williamson bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki rata-rata yang rendah karena memiliki angka yang mendekati nol. Dimana Kabupaten Tanah Bumbu memiliki rata-rata angka yang lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarmasin. *Kedua*, hasil dari analisis indeks Gini Rasio yang diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu berfluktuatif setiap tahunnya. Dimana Kota Banjarmasin memiliki rata-rata angka indeks Williamson lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan. *Ketiga*, hasil analisis komparatif indeks Williamson dan indeks Gini Rasio bahwa masing-masing alat analisis memiliki hasil yang berbeda sehingga dapat dijabarkan jika tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah tinggi untuk Kabupaten Tanah Bumbu terjadi karena peran sektor ekonomi yang bertumpu

pada sumber daya alam (pertambangan dan penggalian batubara) serta kurang lancarnya penyebaran barang dan jasa ke berbagai wilayah. Akan tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu rendah karena deprensiasi pekerjaan masyarakat Tanah Bumbu yang tidak hamper jauh sehingga distribusi pendapatannya lebih merata daripada Kota Banjarmasin. Kemudian tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin rendah karena Kota Banjarmasin merupakan pusat/konsentrasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan (ibukota provinsi), selain itu juga memiliki luas wilayah yang kecil sehingga mudah untuk diatur dan ditata serta memiliki kelengkapan infrastrukturnya. Akan tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya lebih tinggi karena perbedaan jenis pekerjaan dan *skill* yang dimiliki masyarakat Banjarmasin sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatannya.

#### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diberikan guna mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu (1) Untuk pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar seharusnya dapat melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayahnya, yaitu dengan melakukan antisipasi terhadap kegiatan ekonomi yang tidak bergantung terhadap SDA untuk keberlanjutan ekonomi dimasa yang akan datang, perlu pula pengembangan secara intensif pada sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertanian, kehutanan dan pertanian yang mengarah pada subsektor perkebunan, subsektor perikanan dan sektor industri pengolahan guna

mengantisipasi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian sehingga perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu tetap terjamin keberlanjutannya (2) Untuk pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan agar seharusnya dapat menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi yang tidak berorientasi pada SDA seperti sektor industri pengolahan, dengan sebuah program kerja baru berupa pemusatan kawasan industri agar lebih mudah dalam pembimbingan dan pengawasan. Pengembangan industri-industri kreatif atau UMKM juga sangat berpotensi dikembangkan bahkan oleh penduduk kelompok ekonomi menengah kebawah dengan modal terbatas dan juga perlu adanya pelatihan ketenagakerjaan untuk menambah *skill* masyarakat agar dapat bertahan hidup di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

#### Daftar Referensi

- Arsyad, L. (1999). *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Bappeda. (2017). *Indikator Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2017*. Tanah Bumbu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Bumbu.
- Rahmadiyah, F. (2015). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan [Skripsi]*. Banjarmasin: FEB ULM.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.